

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki risiko bencana yang cukup tinggi. Berdasarkan geografis, Indonesia adalah negara kepulauan di mana terdapat empat lempeng tektonik yang bertemu yaitu pertama lempeng Benua Asia, kemudian lempeng Benua Australia, lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pada bagian timur dan selatan Pulau Sumatera terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Dibagian sisinya terdapat gunung-gunung yang terbentuk oleh letusan gunung berapi yang lama dan dataran rendah, yang sebagian besar terdiri dari rawa-rawa, sangat rentan terhadap bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir, dan tanah longsor¹.

Gambar 1. 1

Peta Indeks Kerawanan Bencana di Indonesia



Sumber: www.bnpb.go.id, 2020

¹ <http://www.bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana>

Pada gambar 1.1 bisa dilihat bahwa Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, terutama di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi yang diberi tanda berwarna merah bertanda bahwa tingkat rawan yang tinggi. Terdapat berbagai macam jenis bencana yang terdiri dari bencana alam dan bencana non alam serta bencana sosial, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa bencana merupakan suatu kondisi atau rangkaian situasi yang menyebabkan terganggunya keberlangsungan hidup masyarakat, akibat dari faktor alamiah, faktor nonalamiah, maupun faktor yang bersumber dari aktivitas manusia. Bencana ini membawa konsekuensi serius berupa jatuhnya korban jiwa, kerusakan terhadap lingkungan alam maupun buatan, kehilangan aset ekonomi, dan menimbulkan dampak psikologis yang dapat memperburuk kondisi sosial masyarakat terdampak.²

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana mengidefinisikan bencana sebagai suatu kejadian atau serangkaian peristiwa yang berdampak pada terganggunya stabilitas kehidupan masyarakat, yang dapat disebabkan oleh unsur-unsur alami seperti fenomena geologis dan meteorologis, ataupun oleh faktor nonalam seperti kegagalan teknologi dan aktivitas manusia yang menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan efek psikologis³. Dampak bencana alam di Indonesia tidak hanya terbatas pada korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Bencana alam juga dapat menyebabkan gangguan ekonomi dan sosial, seperti penurunan produktivitas,

² UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

³ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

berkurangnya akses terhadap kebutuhan pokok, dan meningkatnya angka kemiskinan.

Negara Indonesia adalah negara yang beriklim tropis basah yang memiliki ciri-ciri berupa tingginya curah hujan selama musim penghujan. Musim penghujan sering kali menjadi pemicu terjadinya berbagai bencana di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti peristiwa banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor. Sebagai negara yang rawan bencana, Indonesia telah menyadari bahwa setiap bencana yang terjadi bukan sekedar menimbulkan kerugian secara fisik seperti rusaknya harta benda, infrastruktur, dan lingkungan, tetapi juga membawa dampak serius terhadap kondisi psikologis masyarakat. Semua bentuk kerusakan dan penderitaan tersebut pada akhirnya dapat memperlambat upaya pembangunan nasional yang tengah diupayakan.

Salah satu provinsi di Indonesia yang berada pada pesisir barat pulau Sumatera yang sering mengalami bencana alam yaitu Sumatera Barat. Dari seluruh wilayah di Indonesia, Sumatera Barat memiliki indeks risiko bencana yang paling tinggi. Provinsi Sumatera Barat menghadapi beragam jenis bencana alam, di antaranya gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, banjir bandang, abrasi pantai, kebakaran, serta angin kencang, yang masing-masing memiliki potensi menimbulkan kerusakan besar terhadap kehidupan masyarakat dan infrastruktur daerah. Dikarenakan Sumatera Barat memiliki banyak sungai yang berhulu di pegunungan, Kondisi curah hujan yang tinggi sering kali menyebabkan debit air sungai dan saluran air melebihi kapasitasnya, sehingga air meluap dan memicu terjadinya banjir di kawasan sekitarnya, selain itu banjir juga dapat terjadi

karena uapan lahar dngin yang berasal dari pegunungan api yang aktif. Selain itu, Sumatera Barat juga memiliki curah hujan yang tinggi yang akan memperparah risiko longsor dan banjir.

Provinsi Sumatera Barat memiliki gunung berapi yang masih aktif seperti Gunung Marapi dan Gunung Talang, gunung berapi yang aktif ini dapat mengeluarkan abu vulkanik yang berbahaya, gas beracun serta adanya aliran lava yang bisa merugikan lingkungan masyarakat disekitar pegunungan aktif tersebut apabila gunung tersebut mengalami letusan. Aliran lava akan semakin parah apabila di pengaruhi oleh curah hujan yang tinggi⁴.

Tabel 1.1

Persentase Daerah Kabupaten Sumatera Barat yang selalu Mengalami 5 Jenis Bencana Alam

No	Daerah	Longsor	Angin Kencang	Karhutla	Banjir	Banjir Bandang
1.	50 Kota	28,4%	27,2%	26,2%	14,8%	3,5%
2.	Pasaman	9,3%	66,4%	4,5%	13,4%	2,8%
3.	Sijunjung	15,0%	43,0%	30,1%	7,0%	4,9%
4.	Solok	32,0%	30,03%	15,5%	16,5%	5,6%
5.	Solok Selatan	24,0%	45,7%	1,6%	24,0%	4,7%
6.	Tanah Datar	25,3%	56,1%	13,8%	2,1%	2,6%
7.	Darmasraya	6,7%	39,7%	21,1%	31,6%	1,0%

Sumber: BPBD Sumatera Barat 2023

⁴ Gregory Jay, "Volcanic eruption" in Ciottone's Disaster Med (Elsevier, 2024) 631.

Dapat dilihat dari tabel diatas terdapat 7 Kabupaten di Sumatera Barat yang selalu mengalami 5 bencana alam seperti longsor, angin kencang, karhutla, banjir, dan banjir bandang. Sepanjang tahun 2024 ini sudah terjadi bencana alam yang timbul akibat intensitas curah hujan tinggi, seperti banjir, longsor, dan banjir lahar dingin. pada bulan Maret 2024 tercatat sebanyak 9 daerah di Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir dan juga longsor, yaitu Kota Padang, Pariaman, Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, Kepulauan Mentawai, dan LimapuluhKota⁵.

Salah satu dari tujuh wilayah di Sumatera Barat yang rentan terhadap bencana banjir adalah Tanah Datar dan juga menjadi salah satu daerah yang memiliki ancaman lebih parah. Hal ini disebabkan karena lokasi Tanah Datar berada dekat dengan pegunungan aktif marapi dimana selain bencana banjir ataupun longsor, disana juga dapat terdampak bencana alam gunung meletus, kondisi ini diperparah jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi ataupun meluapnya lahar gunung merapi yang akan mengakibatkan banjir lahar dingin. Dengan demikian, Kabupaten Tanah Datar menjadi lokus dalam penelitian ini.

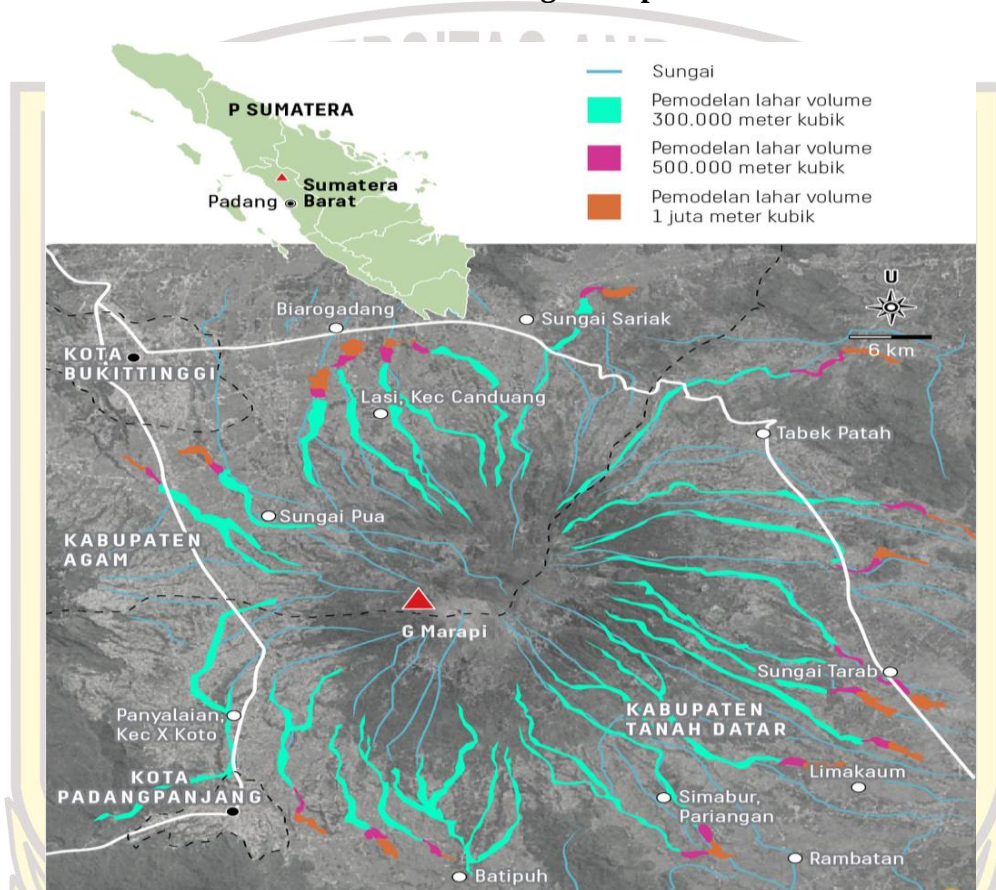
Banjir lahar dingin yang dikenal sebagai *galodo* terjadi pada awal tahun 2024, banjir tersebut berasal dari material vulkanik akibat aktivitas gunung berapi. kemudian dipicu dengan intensitas hujan yang tinggi. Frekuensi kejadian banjir lahar dingin tergolong rendah, namun dampak yang ditimbulkan kerusakan yang besar. Banjir lahar dingin yang terjadi di Sumatera Barat terjadi pada 3 daerah di Sumatera Barat yaitu Agam, Tanah datar, dan Padang Panjang. Peristiwa ini

⁵ Hendra, M. N., & Ajijah. (2024, March 8). 9 Daerah Sumbar Dilanda Banjir dan Longsor.

dipicu oleh curah hujan berintensitas tinggi yang terjadi di kawasan hulu Gunung Marapi⁶.

Gambar 1. 2

Peta Persebaran Lahar Gunung Marapi Sumatera Barat



Sumber: www.kompas.id, 2024

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat daerah Agam, Padang Panjang, dan Tanah Datar berada dibawah kaki gunung merapi, yang mana apabila gunung ini meletus maka akan berdampak langsung pada Daerah Tanah Datar. Baik abu vulkanik maupun lahar dingin yang dipicu oleh hujan berintensitas tinggi. Bencana alam yang terjadi pada 3 daerah ini memakan banyak korban dan kerusakan fasilitas.

⁶ Arief, T. M. V. (2024, May 15). Sumbar Berstatus Tanggap Darurat Bencana sampai 26 Mei 2024

Tabel 1.2

Data Korban dan Kerusakan Bencana Alam banjir Lahar Dingin 2024

No.	Daerah	Korban Meninggal	Korban Luka-Luka	Fasilitas Rusak
1.	Agam	24 orang	22 orang	jalan rusak 2 di 2 titik lokasi, 12 unit jembatan rusak, 7 unit Masjid rusak, 3 unit sekolah rusak, 1 unit kesehatan dan 1 unit rumah tertimbun lumpur
2.	Tanah Datar	32 Orang	26 orang	jalan lembah anai (jalan nasional) putus total, 36 unit jembatan rusak, 18 unit masjid rusak, 1 unit sekolah rusak, 87 unit sarana perdagangan
3.	Padang Panjang	2 Orang	1 orang	32 unit rumah rusak, 2 ruas jalan rusak, 3 unit jembatan rusak, 11 unit saluran irigasi rusak, 1 unit mushola rusak

Sumber: Tagana Sumbar 2024

Berdasarkan tabel 1.2, dapat dilihat banyak korban dan fasilitas yang rusak karena bencana banjir lahar dingin tersebut menjadikan daerah tersebut berstatus Tanggap Darurat Bencana hingga waktu yang ditentukan⁷. Namun sudah ditetapkan bahwa status tanggap darurat dimulai dari tanggal 13 Mei sampai dengan 25 Mei 2024. Melihat potensi bencana alam yang terjadi yang berstatus tanggap darurat, menjadi suatu ancaman bagi masyarakat. Terutama pada daerah Tanah datar, karena bencana banjir lahar dingin/galodo di Tanah Datar menjadi

⁷ <https://regional.kompas.com/read/2024/05/15/172825278/sumbar-berstatus-tanggap-darurat-bencana-sampai-26-mei-2024> diakses tanggal 08 Oktober 2024

sorotan khusus karena skala kerusakan yang begitu masif dan dampak sosial yang luas.

Gambar 1. 3
Banjir Lahar Dingin Kabupaten Tanah Datar



Sumber: BPBD Tanah Datar 2024

Bencana alam yang terjadi tentunya memerlukan penanggulangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan ini mengatur mengenai langkah-langkah penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, tanggap darurat, dan pemulihan setelah terjadinya bencana. Tanggap darurat menjadi bagian yang paling vital dalam respons terhadap bencana, karena saat bencana terjadi perlunya penanganan khusus untuk meminimalisir dampak buruk yang lebih luas terhadap masyarakat seperti kerusakan/korban jiwa. Collins (2008) menjelaskan bahwa tanggap darurat adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memberikan respons terhadap kejadian darurat mengingat kemungkinan bencana yang tidak dapat diprediksi yang muncul selama upaya pencegahan kerusakan yang lebih besar.

Tanggap darurat bertujuan memberikan respon yang cepat dalam penanganan korban, evakuasi korban, memberikan bantuan medis, bantuan logistik, serta bantuan psikoterapi kepada korban bencana. Durasi waktu untuk tanggap darurat bervariasi berdasarkan skala bencana. Untuk bencana skala sedang berlangsung tanggap darurat selama 7 hari, sedangkan bencana skala besar maka bisa berlangsung hingga 14 hari/lebih jika diperlukan.

Untuk menghadapi tantangan saat tanggap darurat bencana, pemerintah Indonesia memiliki peran penting untuk penanggulangan bencana alam. Penanggulangan bencana di Indonesia dilakukan oleh BNPB, berdasarkan peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB memiliki tugas dalam penanggulangan bencana terutama saat tahap tanggap darurat bencana, namun disisi lain BNPB tidak hanya bekerja sendiri, untuk tiap daerah terdapat BPBD dalam penanggulangan bencana dan juga BASARNAS. Selain itu terdapat organisasi relawan yang membantu dalam penanggulangan bencana yaitu organisasi TAGANA (Taruna siaga Bencana).

TAGANA berasal dari masyarakat dengan jiwa relawan yang tinggi karena saat penanggulangan bencana alam bukan hanya dari pihak pemerintah saja yang turun namun, masyarakat juga memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana, mengingat mereka merupakan aktor utama dalam upaya penyelamatan selama fase tanggap darurat. Selain itu, pihak yang paling rentan menjadi korban adalah masyarakat akibat dampak bencana. Pentingnya masyarakat untuk ikut andil dalam penanggulangan bencana diperkuat juga dalam Pasal 26 ayat 1e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang

mengatur bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses dalam mengambil keputusan dalam penanggulangan bencana, termasuk pada saat tanggap darurat.

Menyadari karena pentingnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana untuk kesejahteraan sosial, Departemen Sosial, melalui Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, membentuk Taruna Siaga Bencana (TAGANA) secara serentak. TAGANA merupakan organisasi kemanusiaan yang dibentuk oleh Kementerian Sosial untuk membantu masyarakat dalam penanggulangan bencana. TAGANA berperan penting saat proses penanggulangan bencana, terdapat tiga tahap utama, pertama persiapan pra bencana, respons tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI (Permensos RI) No. 29 Tahun 2012, dalam Pasal 1 ayat (1), mengungkapkan bahwa TAGANA merupakan relawan sosial yang terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dari komunitas yang aktif dalam penanggulangan bencana.

Sebagai bagian dari program nasional, TAGANA memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah respons bencana yang di koordinasikan langsung oleh Kemensos, TAGANA mendapatkan arahan umum mengenai kebijakan penanggulangan bencana, pelatihan, serta penguatan kapasitas relawan untuk menghadapi berbagai tahap penanganan bencana, mulai dari mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan.

Ditingkat daerah, TAGANA Beroperasi di bawah pengawasan Dinas Sosial (Dinsos) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dalam hal ini, Dinas Sosial

memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan Kemensos sekaligus pembina teknis dan operasional TAGANA di wilayah masing-masing. Dinsos bertanggung jawab untuk memberikan dukungan logistik, peralatan, pelatihan teknis, dan supervisi terhadap kinerja TAGANA dalam penanggulangan bencana. TAGANA bekerja sebagai mitra operasional Dinas Sosial dalam bidang kebencanaan. TAGANA adalah pelaksana langsung berbagai tugas kebencanaan, seperti evakuasi korban, distribusi logistik, pendirian dapur umum, dan pelayanan psikososial. Dalam pelaksanaan tugas ini, mereka berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan sumber daya, perencanaan, dan arahan teknis.

Anggota TAGANA dapat direkrut berdasarkan usulan dari organisasi, kelompok, atau komunitas tertentu, atau melalui keputusan individu yang berminat (kemauan sendiri). TAGANA sebagai organisasi memiliki elemen-elemen penting seperti visi, misi, tujuan yang terarah, struktur organisasi yang jelas, serta pembagian tugas, hak, dan kewajiban bagi anggota..

TAGANA bertujuan untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana, baik sebelum, saat, dan setelah bencana. Namun, dari perspektif berbagai tahapan penanggulangan bencana, TAGANA jelas berpartisipasi secara aktif pada tahap tanggap darurat bencana. Artinya TAGANA sebagai perpanjangan tangannya pemerintah harus memberikan tanggapan darurat segera pada saat menemukan beberapa area yang memiliki kemungkinan terjadinya bencana. Dalam konteks tanggap darurat, TAGANA berperan dalam melakukan berbagai upaya meliputi pendirian shelter, penyediaan logistik, pengoperasian dapur umum, penggerakan potensi dan sumber daya manusia (SDM TAGANA, relawan, TSK,

dan lainnya), serta pelaksanaan evakuasi kepada para korban bencana. Selain itu, TAGANA juga turut melakukan analisis risiko dan pemenuhan kebutuhan dasar bersama dinas dan instansi terkait⁸.

TAGANA memiliki fungsi dalam penanggulangan bencana alam. Fungsi yang dimiliki TAGANA ada 3 tahap yaitu tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pra bencana. Fungsi TAGANA saat prabencana yaitu:

- a. Pendataan dan pemetaan wilayah yang rawan bencana sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi potensi bencana yang dapat terjadi.
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana melalui pelatihan dan pemberdayaan agar mereka lebih siap dalam menghadapi potensi bencana.
- c. Mengurangi risiko bencana di lingkungan yang rentan terhadap bencana dengan mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi dan perlindungan yang efektif.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana melalui sosialisasi, simulasi, dan pelatihan tanggap darurat. Fasilitasi dalam pembentukan kampung siaga bencana, sebagai upaya untuk menciptakan komunitas yang siap dan tanggap terhadap bencana yang mungkin terjadi.
- e. Pendeteksian dini pada masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya bencana dengan menggunakan sistem peringatan yang terintegrasi. Evakuasi bersama pihak terkait, terutama dalam bidang perlindungan sosial terhadap bahaya

⁸ Evaluasi peran Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam penanggulangan bencana alam. (2022). *Irtanto*.

yang mengancam, serta mengurangi risiko bencana dan kesiapsiagaan lainnya.

Saat bencana terjadi TAGANA memiliki fungsi tahap tanggap darurat yaitu⁹ :

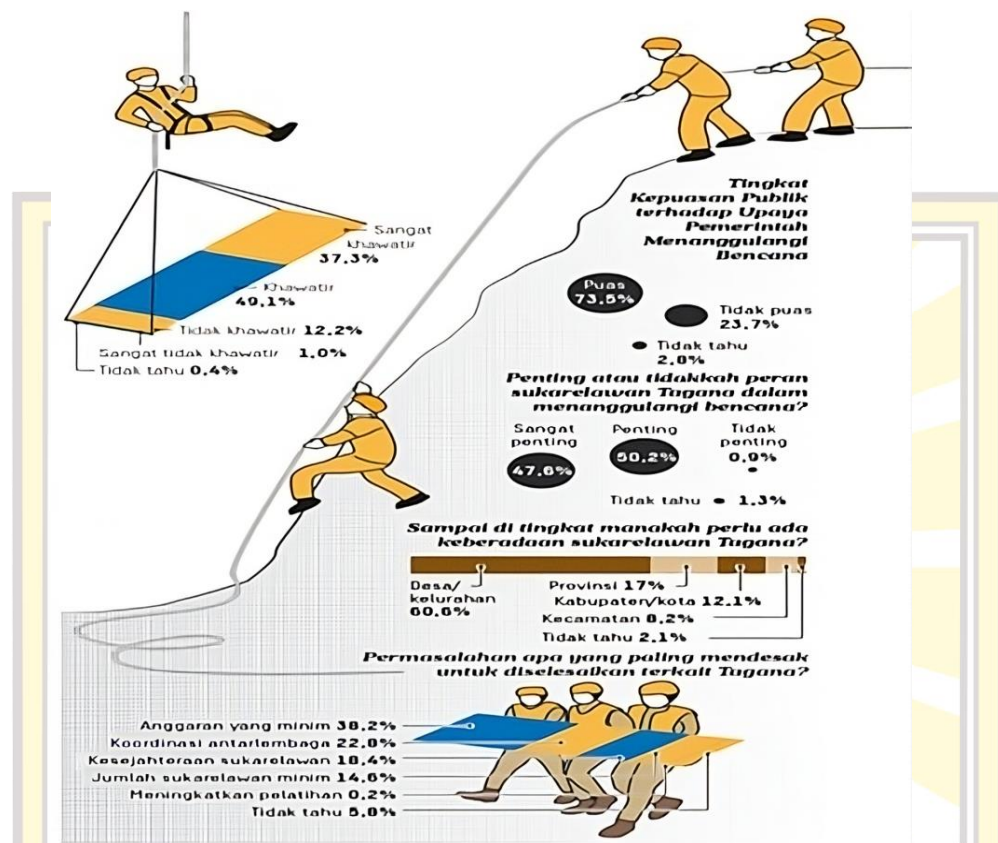
- a. Kaji cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas/instansi sosial serta berkoordinasi dengan TRC bidang perlindungan sosial
- b. Identifikasi/pendataan korban bencana
- c. Operasi tanggap darurat
- d. Operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum
- e. Operasi tanggap darurat pada bidang logistik
- f. Mobilisasi dan mengerahkan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko

Selanjutnya fungsi TAGANA pada Pascabencana yaitu:

- a. Identifikasi/pendataan kerugian material pada korban bencana
- b. Identifikasi/pendataan kerusakan rumah atau tempat tinggal korban
- c. Penanganan bidang psiskosial dan rujukan
- d. Upaya penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait
- e. Pendampingan dan advokasi sosial

⁹ Tagana Indonesia

Gambar 1. 4
Urgensi TAGANA



Sumber: <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/05/13/tagana-dan-kekhawatiran-publik-akan-bencana>

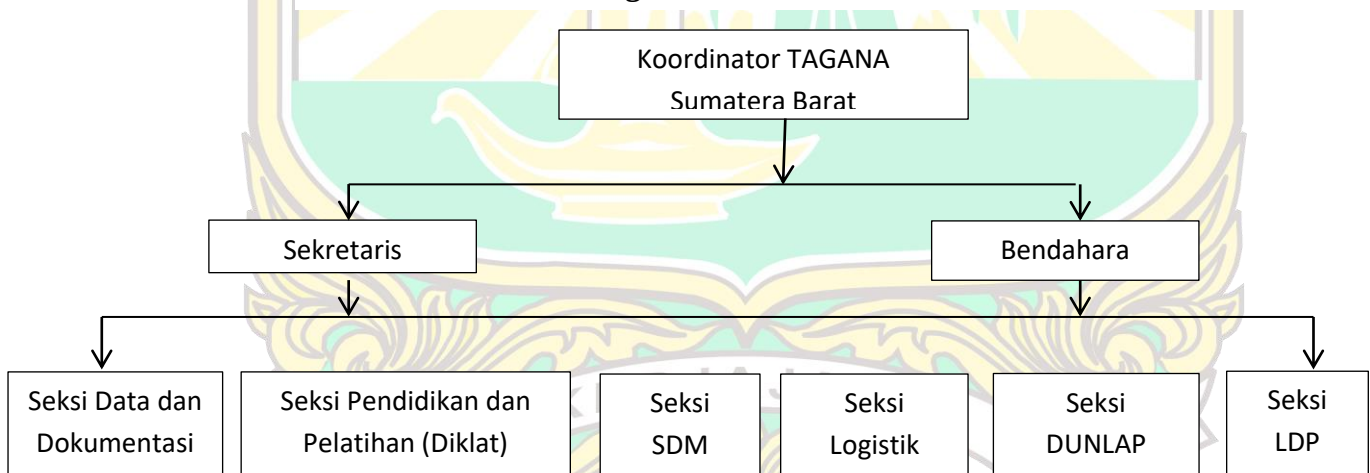
Berdasarkan gambar 1.4 dapat dilihat bahwa TAGANA memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana alam. Selain pemerintah, TAGANA juga turut andil membantu dalam penanggulangan bencana alam terutama pada tingkat provinsi, diperlukannya keberadaan TAGANA. Keberadaan TAGANA sangat diperlukan karena mereka memiliki kemampuan khusus yang mencakup berbagai aspek, seperti penyelamatan, evakuasi, distribusi logistik, serta pendampingan psikososial kepada korban bencana. Selain itu, TAGANA berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait dalam

menjalankan koordinasi yang efektif selama masa krisis. Peran ini menjadi semakin penting di daerah-daerah rawan bencana

TAGANA yang ada pada Provinsi Sumatera Barat ikut turut andil pada saat evakuasi korban bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat. TAGANA Sumatera Barat ikut berkoordinasi dengan berbagai instansi yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana alam. Sehingga terbentuknya pembagian tugas antar instansi yang terkait. Terutama pada saat tanggap darurat bencana, karena Tim TAGANA Sumatera Barat dibentuk untuk menghadapi dan mengelola situasi darurat bencana, khususnya di wilayah yang rawan seperti Sumatera Barat, yang kerap dilanda gempa bumi, banjir, longsor, dan berbagai bencana alam lainnya.

Gambar 1.5

Struktur Organisasi TAGANA Sumatera Barat



Sumber: Olahan Peneliti, 2025

TAGANA Sumatera Barat mempunyai struktur organisasi yang terorganisir dengan baik untuk mendukung tugas-tugas penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Struktur ini terdiri dari berbagai unit yang saling berkoordinasi untuk menangani berbagai aspek penanggulangan bencana, mulai

dari tanggap darurat, logistik, dukungan psikososial, hingga rehabilitasi dan pemulihan. Dalam hal ini, setiap unit dalam organisasi memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan tanggapan cepat dan efisien terhadap bencana, termasuk bencana banjir lahar dingin yang sering terjadi di wilayah Sumatera Barat.

TAGANA Sumatera Barat selalu siap siaga di garis depan saat bencana alam melanda. Dengan sigap, mereka turun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan darurat kepada masyarakat yang terdampak. Mulai dari pembangunan shelter dan penyaluran bantuan logistik saat tahap tanggap darurat, Tagana Sumatera Barat hadir sebagai garda terdepan dalam meringankan beban masyarakat yang tengah mengalami kesulitan. Turunnya TAGANA Provinsi Sumatera Barat saat bencana bukan sekedar asal turun. Berdasarkan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang pedoman umum TAGANA pasal 4 ayat (2) TAGANA Sumbar turun apabila bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Barat dikategorikan berskala besar (nasional).

Tabel 1.3

Bencana Nasional yang Melibatkan Peran Aktif TAGANA Sumatera Barat dalam Penanganannya (Periode 2020–2024)

No	Jenis Bencana	Waktu Kejadian	Lokasi Bencana
1.	Gempa Bumi	25 Februari 2022	Pasaman dan Pasaman Barat
2.	Banjir dan Longsor	7-9 Maret 2024	Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Kota Padang,

			Solok
3.	Banjir Lahar Dingin dan Longsor	11-12 Mei 2024	Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Padang, Panjang

Sumber: Data TAGANA Sumatera Barat Tahun 2025

TAGANA Sumatera Barat turun saat mendapatkan arahan dari Kementerian Sosial, hal ini dikarenakan saat bencana yang berskala nasional membutuhkan bantuan logistik yang berasal dari Kementerian Sosial. Perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial berada pada Dinas Sosial Provinsi, kemudian dari Dinas Sosial akan mengarahkan TAGANA Sumatera barat untuk turun dalam tahap tanggap darurat bencana alam. Kemudian TAGANA provinsi akan mengerahkan TAGANA kota/kabupaten dalam tanggap darurat bencana tersebut. Namun apabila bencana yang terjadi pada daerah/kabupaten Sumatera Barat tidak berskala besar(nasional) maka TAGANA Sumatera Barat tidak perlu turun saat bencana tersebut terjadi karena adanya perwakilan TAGANA kota/kabupaten pada tiap daerah Sumatera Barat.

Gambar 1. 7**Pembangunan Tenda Pengungsian Oleh Tim TAGANA Sumatera Barat**

Sumber: TAGANA Sumatera Barat 2024

Pada gambar 1.7 dapat dilihat bahwa Tim TAGANA Sumatera Barat memiliki peran penting dalam menyediakan shelter tenda pengungsian bagi korban bencana alam. Hal ini dikarenakan bencana yang terjadi merupakan bencana yang berskala besar dimana para korban bencana alam untuk sementara tidak dapat tinggal dirumah mereka masing-masing, karena adanya kerusakan yang parah. Tenda-tenda ini dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti alas tidur dan penerangan. Selain menyediakan tenda, Tim TAGANA Sumatera Barat juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti PMI dan KSB untuk memastikan pengungsi mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Upaya ini menunjukkan bagaimana Tim TAGANA Sumatera Barat dalam menjalankan perannya sebagai garda terdepan dalam fase tanggap darurat bencana.

Gambar 1. 8**Pemberian Bantuan Logistik Oleh Tim TAGANA Sumatera Barat**

Sumber: TAGANA Sumatera Barat 2024

Kemudian pada gambar 1.8 dapat dilihat juga bahwa Tim TAGANA Sumatera Barat memberikan bantuan logistik kepada korban bencana alam. Tidak hanya mendirikan tenda pengungsian namun juga memberikan bantuan logistik saat tanggap darurat bencana alam. Bantuan logistik yang diberikan oleh Tim TAGANA Sumatera Barat mencakup kebutuhan dasar seperti makanan siap saji, air bersih, perlengkapan tidur, pakaian, dan kebutuhan khusus seperti makanan bayi dan obat-obatan. Bantuan yang diterima oleh korban bencana tidak hanya dari kementerian sosial, tetapi juga ada dari pihak pemerintah daerah lainnya. Pada tahap tanggap darurat, TAGANA bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memastikan bahwa distribusi logistik dilakukan secara merata dan tepat sasaran.

Bencana alam yang terjadi pada daerah Tanah Datar mengikutsertakan TAGANA Sumatera Barat dalam pemberian bantuan seperti bantuan evakuasi dan bantuan logistik berupa pendirian dapur umum untuk memberikan makanan kepada korban bencana dan juga untuk para tim yang melakukan penanggulangan bencana saat terjadinya bencana alam. Hal ini dikarenakan bencana yang terjadi di Tanah Datar merupakan bencana berskala besar yaitu bencana banjir lahar dingin yang mengalami kerusakan berskala masif. Selain berskala besar, bencana tersebut termasuk pada bencana nasional. Bantuan berasal dari Kementerian Sosial yang akan disalurkan melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, kemudian dinas sosial mengutus TAGANA Sumatera Barat untuk memberikan bantuan ke tempat dimana bencana terjadi.

Selain itu pada tahap tanggap darurat bencana banjir lahar dingin, TAGANA Sumatera Barat melakukan koordinasi yang erat dengan TAGANA Tanah Datar untuk memastikan respons yang cepat dan terorganisir. TAGANA Sumbar sebagai koordinator provinsi memiliki peran strategis dalam menyatukan berbagai elemen yang terlibat dalam penanggulangan bencana, termasuk TAGANA di tingkat kabupaten/kota, seperti di Tanah Datar. Dalam hal ini, TAGANA Tanah Datar bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menangani kebutuhan darurat di tingkat lokal, sementara TAGANA Sumbar memberikan dukungan logistik, sumber daya, dan arahan operasional yang diperlukan untuk mempercepat penanganan bencana. Koordinasi ini mencakup distribusi bantuan, pengelolaan pos pengungsian, serta pendistribusian tim tanggap darurat, termasuk penyediaan dukungan psikososial dan fasilitas lainnya. Kerjasama yang baik

antara kedua tingkat ini memastikan bahwa strategi penanggulangan bencana dapat dijalankan secara efektif, mengurangi dampak bencana bagi masyarakat Tanah Datar.

Gambar 1. 9

**Evakuasi dan Pemberian Bantuan Logistik Makanan Saat Terjadi
Bencana Alam**



Sumber: Dokumentasi TAGANA Sumbar 2024

Gambar 1.9 menggambarkan bagaimana TAGANA Sumatera Barat ikut turun saat terjadi bencana galodo di 3 daerah Sumatera Barat seperti Agam, Tanah Datar, Padang Panjang. Selain membantu evakuasi, Tim TAGANA Sumatera Barat membangun dapur umum untuk makanan bagi para korban bencana tersebut. Dalam proses evakuasi, Tim TAGANA Sumatera Barat bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan aparat TNI/Polri untuk menyelamatkan warga yang terdampak banjir bandang. Mereka menggunakan peralatan seperti perahu karet dan tali penyelamat untuk mengevakuasi warga yang terjebak di rumah mereka namun, tentu saja penyelamatan yang dilakukan TAGANA perlu adanya arahan dari Tim SAR sendiri, karena Tim SAR yang lebih paham. Selain evakuasi, Tim TAGANA

Sumatera Barat mendirikan dapur umum untuk menyediakan makanan bagi para pengungsi, hal ini merupakan tugas pokok dari TAGANA sendiri.

Kehadiran Tim TAGANA Sumatera Barat dalam situasi darurat ini menunjukkan peran strategis mereka dalam membantu masyarakat terdampak, tidak hanya melalui evakuasi tetapi juga dengan memastikan kebutuhan dasar korban bencana terpenuhi secara cepat dan efisien. Mereka juga mendirikan posko darurat untuk koordinasi bantuan, memberikan layanan psikososial kepada korban yang mengalami trauma, serta membantu distribusi logistik seperti pakaian, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Partisipasi Tim TAGANA Sumatera Barat tidak hanya mencakup bantuan fisik, tetapi juga penguatan mental para korban agar dapat menghadapi situasi pascabencana dengan lebih baik.

Namun, dalam menjalankan perannya organisasi TAGANA Sumatera Barat menghadapi sejumlah kendala signifikan yang mengganggu efektivitasnya. Permasalahan yang terjadi pada saat Tim TAGANA Sumatera Barat turun lapangan yaitu tim Tim TAGANA Sumatera Barat yang mengalami kesulitan seperti keterbatasan peralatan dan fasilitas, selain itu hambatan yang terjadi apabila saat menuju lokasi bencana adanya jalan terputus yang mengakibatkan terlambatnya Tim TAGANA untuk sampai tujuan. Hambatan lain yang dialami oleh TAGANA kekurangan sumber daya manusia (SDM) menjadi masalah yang krusial bagi TAGANA Sumatera Barat. Dengan jumlah anggota yang terbatas, Tagana sering kali kesulitan mengerahkan tim yang memadai untuk menghadapi bencana dalam skala besar atau di berbagai titik lokasi secara bersamaan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan koordinator TAGANA Sumbar Bapak

Yudi Aningskar Widayanto:

“TAGANA Sumbar memiliki sumber daya manusia sebanyak 604 relawan. Dalam hal jumlah sementara ini sudah mencukupi namun, relawan tersebut pastinya memiliki pekerjaan pokok lain sehingga saat adanya bencana alam yang terjadi tidak semua relawan bisa turun, jika relawan berada di daerah terjadinya bencana maka bisa langsung turun tetapi jika berada di luar daerah maka adanya sedikit kesulitan dalam hal keberangkatan terutama perizinan dari tempat pekerjaan pokok yang dimiliki relawan” (wawancara dengan koordinator TAGANA Sumbar pada tanggal 14 Oktober 2024).

Hal ini menjadi semakin parah jika bencana terjadi di daerah terpencil yang sulit dijangkau atau bencana yang terjadi di tempat tinggal relawan mengakibatkan relawan tidak bisa turun lapangan bersama tim karena harus memprioritaskan keluarganya dalam pengevakasian sehingga Tagana sering kali harus bekerja dengan personel seadanya. Dengan permasalahan tersebut, peneliti ingin menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan oleh TAGANA Sumatera Barat dalam mengatasi permasalahan dan hambatan saat tanggap darurat bencana.

Kurangnya penelitian yang berfokus pada strategi organisasi TAGANA dalam penanggulangan bencana alam tahap tanggap darurat menjadi faktor pendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini, pada umumnya penelitian mengenai TAGANA hanya fokus kepada tugas dan fungsinya secara umum, sehingga masih sedikit yang secara khusus membahas tentang strategi organisasi TAGANA saat menanggulangi bencana alam tahap tanggap darurat. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis strategi yang diterapkan oleh TAGANA Sumatera Barat dalam tahap tanggap darurat bencana banjir lahar dingin di Tanah Datar, dengan menggunakan teori strategi Richard P. Rumelt sebagai landasan.

Untuk mengetahui bagaimana strategi TAGANA Provinsi Sumatera Barat peneliti menggunakan teori strategi menurut Richard P. Rumelt. Berdasarkan fenomena teoritis yang ditemukan peneliti, yang relevan dengan konsep strategi menurut Richard P. Rumelt, peneliti berpendapat bahwa strategi yang matang diperlukan dalam melaksanakan penanggulangan bencana tahap tanggap darurat oleh TAGANA Sumatera Barat. Salah satu aspek teori tersebut yaitu diagnosis, Proses diagnosis bertujuan untuk mengidentifikasi situasi, mengaitkannya dengan fakta yang relevan, dan memperhatikan permasalahan yang terjadi. TAGANA Sumbar harus mengamati situasi saat bencana alam terjadi seperti penyebab dan akibat suatu bencana terjadi di wilayah tersebut. TAGANA Sumatera Barat harus melihat tantangan yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan bencana tahap tanggap darurat, dengan begitu akan terbentuknya metode untuk menanggulangi masalah yang ada.

Kemudian variabel selanjutnya yaitu kebijakan penuntun, kebijakan penuntun berasal dari hasil diagnosis yang telah dilakukan sebelumnya. Diagnosis dari situasi dan tantangan yang terjadi dalam penanggulangan bencana tahap tanggap darurat, tentunya memerlukan kebijakan untuk mengatasinya. Kebijakan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana tahap tanggap darurat. Setelah kebijakan penuntun dipersiapkan, maka tindakan koheren menjadi langkah untuk melaksanakan semua elemen yang sudah disebutkan sebelumnya. TAGANA Sumbar harus dapat melaksanakan langkah nyata dalam tahap tanggap darurat bencana alam sebagai strategi organisasi dalam upaya penanggulangan bencana alam. Hasil analisis akan memberikan pemahaman

mendalam mengenai sejauh mana strategi yang diterapkan dapat meningkatkan efektivitas respon TAGANA dalam situasi bencana serta memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan strategi penanggulangan bencana di masa depan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Strategi Organisasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Sumatera Barat Dalam Tahap Tanggap Darurat Bencana Banjir Lahar Dingin Di Kabupaten Tanah Datar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka peneliti akan meneliti permasalahan ini dengan rumusan masalah “Bagaimana Strategi Organisasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Sumatera Barat Dalam Tahap Tanggap Darurat Bencana Banjir Lahar Dingin Di Kabupaten Tanah Datar?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pelaksanaan strategi organisasi taruna siaga bencana (TAGANA) Sumatera Barat dalam tahap tanggap darurat bencana banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan perkembangan terhadap bidang ilmu pengetahuan dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan bagaimana Strategi Organisasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Dalam Penanggulangan Bencana Alam Tahap Tanggap Darurat di Sumatera Barat dan diharapkan dapat membantu dan menjadi bahan rujukan bagi TAGANA dalam menanggulangi bencana alam.



